

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



## BALAI POM DIMAMUJU

# KATA PENGANTAR

**Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.**



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dapat menyelesaikan tugas-tugas selama tahun 2018 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama tahun 2018. Di tahun 2018 Balai POM di Mamuju telah menyelesaikan kegiatannya dan memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan di dalam upaya memenuhi Visinya "*Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa*"

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan dan tuangkan dalam laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan Laporan Kinerja ini pada tahun mendatang.

**Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Mamuju, 02 Februari 2019  
Balai POM di Mamuju  
KEPALA



Dra. Netty Nurmuliawaty, Apt  
NIP. 19630104 198903 2 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar & Tabel	v
Ikhtisar Eksekutif	vii
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>I.1. GAMBARAN UMUM</b>	<b>1</b>
<b>I.2. STRUKTUR ORGANISASI</b>	<b>2</b>
<b>I.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI</b>	<b>4</b>
<b>I.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS</b>	<b>5</b>
<b>I.5. ISU STRATEGIS</b>	<b>7</b>
<b>II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>9</b>
<b>2.1. RENCANA STRATEGIS</b>	<b>10</b>
<b>2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018</b>	<b>30</b>
<b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>34</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b>	<b>34</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b>	<b>55</b>
<b>C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN</b>	<b>57</b>
<b>IV PENUTUP</b>	<b>60</b>
<b>4.1. KESIMPULAN</b>	<b>60</b>
<b>4.2. SARAN</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>62</b>

## DAFTAR GAMBAR & TABEL

### Daftar Gambar

Gambar 1 : Struktur Organisasi BPOM di Mamuju

Gambar 2 :Peta Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 3.Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya

Gambar 4. Transformasi BPOM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan

Gambar 5. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Gambar 6. Peta Strategi Level II BB/BPOM

Gambar 7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai POM di Mamuju periode 2017-2019

Gambar 8. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks POM

Gambar 9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 10. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 12. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kosmetika yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 13. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 14. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha.

Gambar 15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepatuhan Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman

Gambar 16. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 17. Jumlah Total Sampel tahun 2018

Gambar 18. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Gambar 19.Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju.

Gambar 20. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 21. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Gambar 22. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Gambar 23. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

## Daftar Tabel

- Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2017 – 2018 (OTK Lama)
- Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)
- Tabel 3. Kerangka Pendanaan (OTK Lama)
- Tabel 4. Kerangka Pendanaan (OTK Baru)
- Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Tabel 6. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018
- Tabel 7. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018 (OTK Baru)
- Tabel 8. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan balai pembanding
- Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1 BPOM di Mamuju Tahun 2018
- Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 BPOM di Mamuju Tahun 2018
- Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 3 BPOM di Mamuju Tahun 2018
- Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 4 BPOM di Mamuju Tahun 2018
- Tabel 14. Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Diwilayah Sulawesi Barat Tahun 2018
- Tabel 15. Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Diwilayah Sulawesi Barat Tahun 2018
- Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 5 BPOM di Mamuju Tahun 2018
- Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 5 BPOM di Mamuju Tahun 2018
- Tabel 18. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja
- Tabel 19. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan
- Tabel 20. Tingkat efisiensi sasaran.

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang menjabarkan Visi dan Misi organisasi ke dalam tujuan dan sasaran strategis/program/kegiatan Balai POM di Mamuju. Tujuan dan sasaran ini dapat dicapai dengan melaksanakan suatu kerja yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut diperlukan anggaran sebagai input kegiatan. Balai POM di Mamuju mendapatkan total anggaran DIPA tahun 2018 sebesar Balai POM di Mamuju adalah sebesar Rp. 26.172.626.000,-, realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.830.506.472,- atau 83,41%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 67,10% dengan presentase kenaikan sebesar 16,31%.

Adapun capaian sasaran strategis sesuai dengan OTK baru dapat dilihat sebagai berikut :

1. *"Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat"* persentase capaian masing-masing Indikator Kinerja yaitu :
  - a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 69.71 %,
  - b. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 106.56 %
  - c. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 96.70 %
  - d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 120.48 %
  - e. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 95.91 %
  - f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 83.53 %
2. *"Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di*

*Mamuju* ” persentase capaian Indikator Kinerja sasaran strategi 2 yaitu Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 42,93 %,

3. “ *Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju* “ persentase capaian Indikator Kinerja sasaran strategi 3 yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 105,30%,
4. “ *Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat* “ persentase capaian masing-masing Indikator Kinerja sasaran strategi 4 yaitu :
  - a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat adalah 96.71 %
  - b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 46.30 %
  - c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 8.63 %
  - d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat adalah 62.50 %,
  - e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 121.06 %.
5. “ *Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju* “ persentase capaian Indikator Kinerja sasaran strategi 5 yaitu Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 50%,
6. “ *Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju* “ persentase capaian Indikator Kinerja sasaran strategi 6 yaitu Nilai AKIP Balai POM di Mamuju adalah 84,94%.

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran nilai TE yang diperoleh berkisar antara -0,40 s/d 0,43. Dari enam sasaran terdapat empat sasaran yang efisien dan dua yang tidak efisien. Efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran strategis ke tiga yaitu “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”, sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran ke enam yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai POM di Mamuju yang telah mengimplementasikan *sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Keberhasilan pencapaian target sasaran dan target kegiatan utama dikarenakan :

1. Pengawasan yang dilakukan secara *timwork* oleh personel Balai POM di Mamuju baik di laboratorium maupun di pemeriksaan dan penindakan.
2. Tingkat pemahaman konsumen dan produsen/distributor OMKABA cukup memadai.
3. SDM Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugasnya secara professional.
4. Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan lintas sektor terkait cukup baik.

Sedangkan kendala dalam pencapaian target, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Perencanaan dan evaluasi belum optimal.
2. Pengumpulan data belum optimal sehingga data *base* yang digunakan belum tepat.
3. Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
4. Jumlah SDM yang masih sangat terbatas.

# I. PENDAHULUAN

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan Prinsip-Prinsip Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan Kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektifitas serta Profesionalisme. Hal ini menunjukkan tekad Bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan instrument pertanggung-jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LAPKIN, dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat.

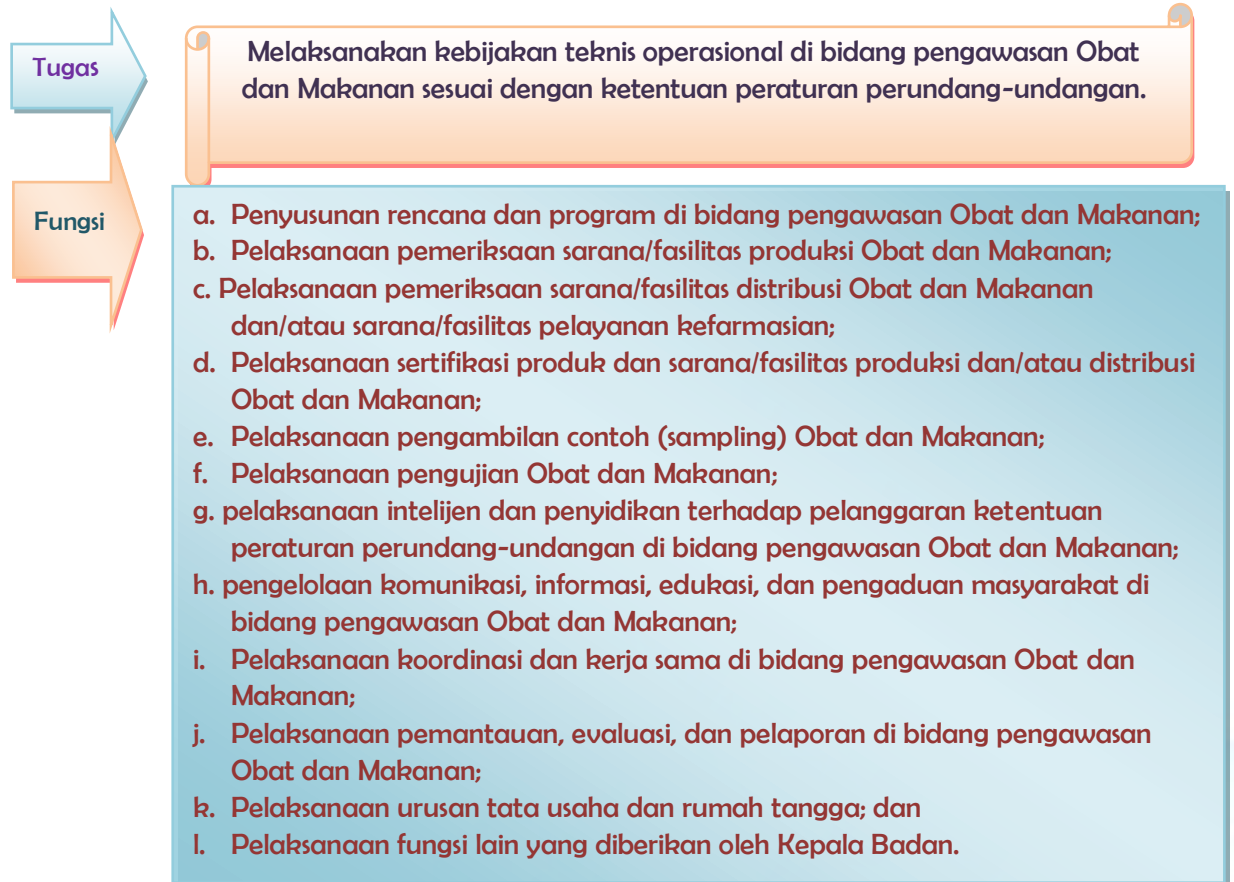
Laporan Kinerja disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, sehingga instansi pemerintah tersebut mampu eksis dan unggul di era perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

## **I.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Balai POM di Mamuju adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makananyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai POM di Mamuju mempunyai **tugas** dan **fungsi** sebagai berikut :

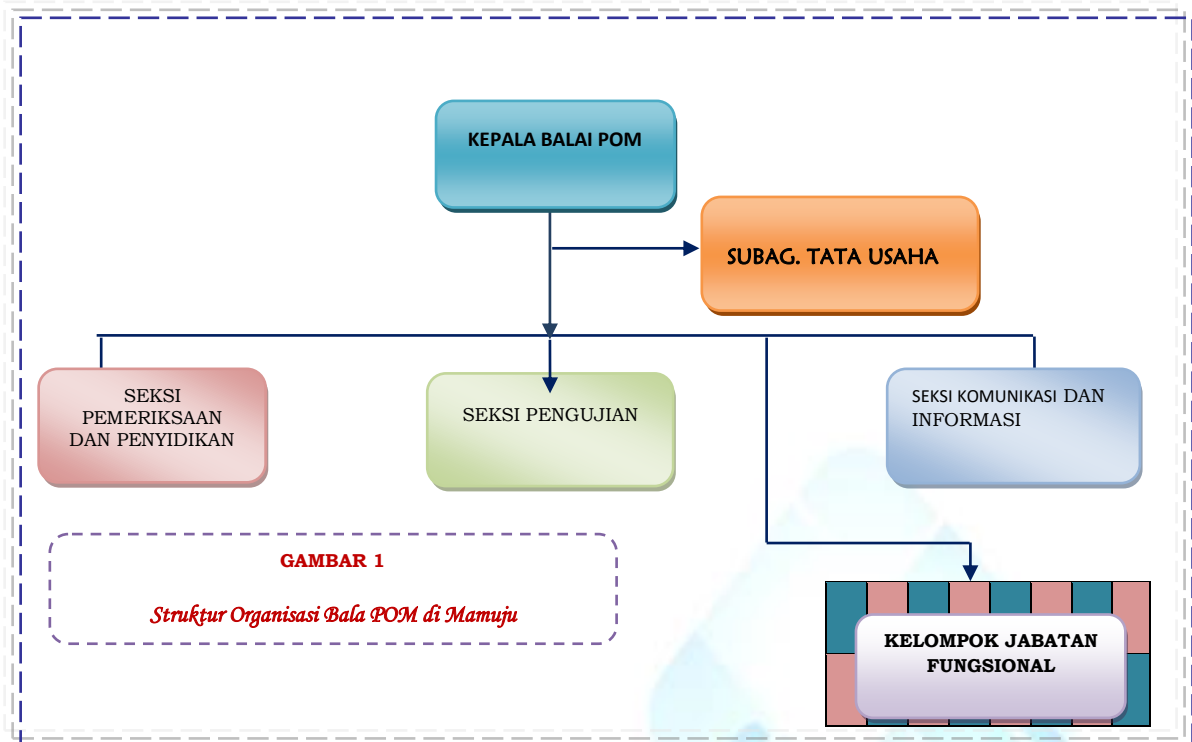


## **I.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1. di bawah ini, secara garis besar unit-unit kerja Balai POM di Mamuju dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Seksi Pengujian dan Seksi Komunikasi dan Informasi serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Mamuju

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 3 Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

### 1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

### 2. Seksi Pengujian

Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

### 3. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan

Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, serta intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### **4. Seksi Informasi dan Komunikasi**

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Balai POM di Mamuju sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Peran dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*pre-market*)
2. Pengawasan obat dan makanan *pasca* beredar di masyarakat (*post-market*)
3. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan pusat dan balai.

Berdasarkan hal tersebut, Balai POM di Mamuju sebagai unit pengawas obat dan makanan di Mamuju perlu melakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja dimasa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama, dan tidak kalah penting adalah

pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Eraglobalisasi/perdagangan bebasyang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai POM di Mamuju perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

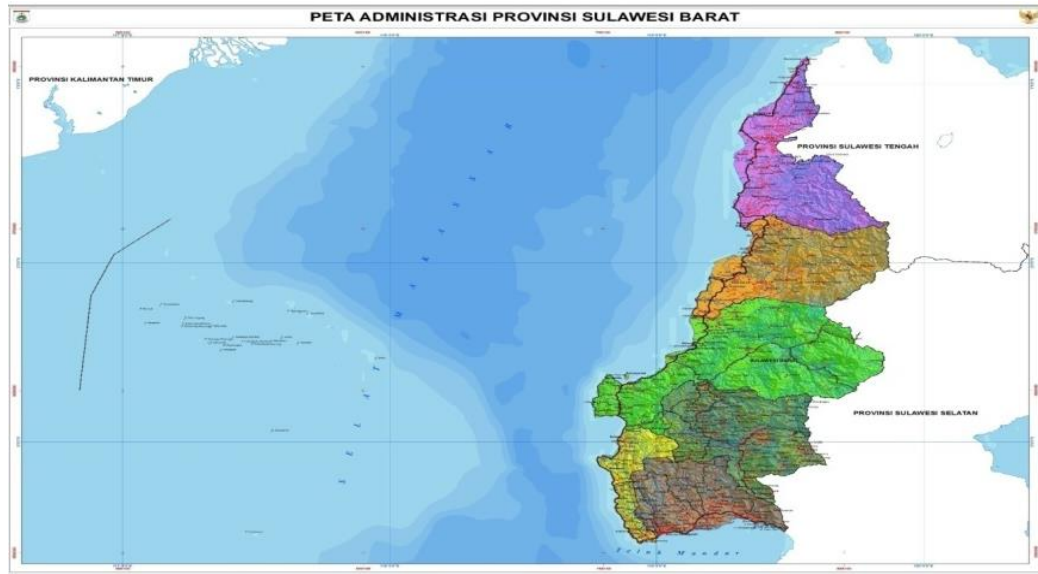
Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, Distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Mamuju.

#### **1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**

Sejak tahun 2017 Balai POM di Mamuju telah menjadi satker mandiri dengan DIPA sendiri dan dalam melaksanakan operasional kegiatan masih memanfaatkan Gedung kantor dengan status sewa/kontrak yang berkedudukan di Jl. Ratulangi No 4 kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, pada periode pelaporan Balai POM di Mamuju telah mempunyai Aset berupa Tanah seluas 9.109 M<sup>2</sup> di Jalan Poros Kalukku Desa Bambu yang merupakan transfer masuk dari Balai Besar POM di Makassar yang perolehan sebelumnya dari Hibah Pemda Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 dan telah balik nama an. Badan POM dengan status sertifikat nomor 027 pada tahun 2016.

Diatas tanah tersebut Balai POM di Mamuju rencana akan melakukan pembangunan dengan 3 (Tiga) tahap yaitu tahap pertama pembangunan Gedung Laboratorium Teranakoko, Laboratorium Pangan dan Laboratorium Mikrobiologi pada tahun 2018, tahap 2 (Dua) pembangunan Gedung Kantor dan Layanan Publik, dan tahap 3 (Tiga) adalah pembangunan sarana dan prasarana lingkungan lainnya.

## Letak Geografis



Gambar 2. Peta Provinsi Sulawesi Barat

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- Sebelah Utara : Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : Sulawesi Selatan
- Sebelah Selatan : Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.937.16 km persegi. Secara administratif Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 6 (Enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, terdiri dari 69 Kecamatan dan 649 Desa/Kelurahan. Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selat Makassar yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari aktivitas perdagangan obat dan makanan di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini menjadi poin penting bagi Balai POM di Mamuju untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

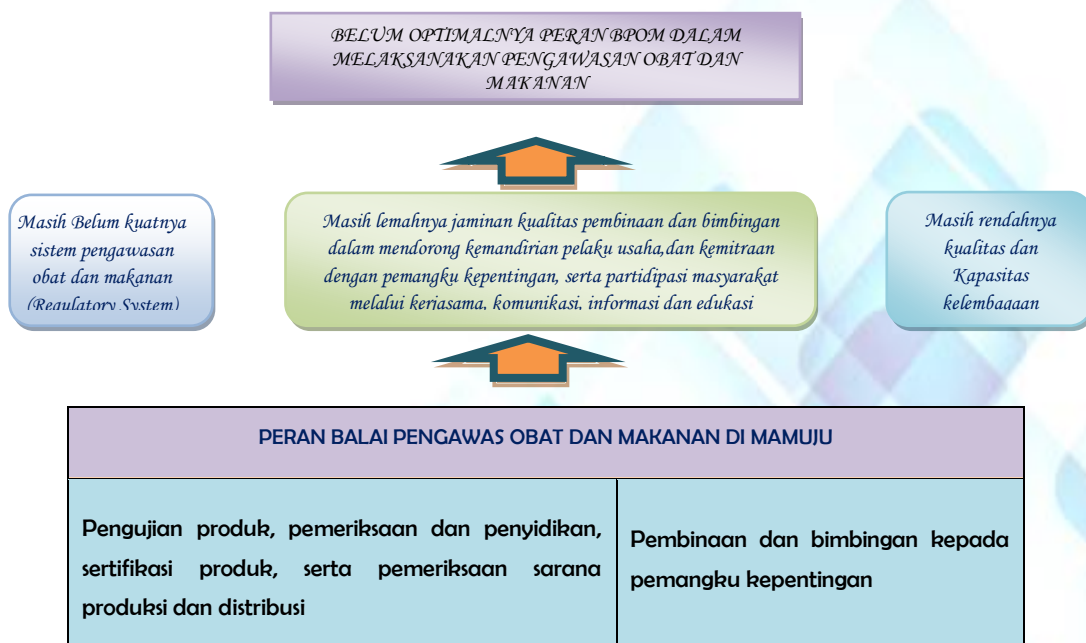
Beberapa aspek penting yang menjadi *concern* pengawasan Balai POM di Mamuju antara lain :

- Jalur perdagangan obat dan makanan di Wilayah Indonesia Timur;
- Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Barat berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetika yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya;
- Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar Sulawesi Barat;

- Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao dan minyak sawit sehingga diperlukan pengawasan sebelum diolah dengan bersinergi bersama SKPD terkait.

## I.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Perubahan dinamis pada lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Mamuju. Lingkungan strategis dengan berbagai *issu* strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju, dan mengawali kinerja tahun 2017, Balai POM di Mamuju menyusun kegiatan strategis terhadap berbagai *issu* yang adasebagaimana digambarkan pada diagram dibawah ini :



Gambar 3. Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya

Pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Mamuju tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:

1. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke Wilayah Sulawesi Barat termasuk di dalamnya adalah produk ilegal;
2. Adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang belum dapat dikawal secara intensif oleh Balai POM di Mamuju;
3. Semakin banyak produsen peracik kosmetika rumahan yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya;

4. Maraknya perdagangan Obat, Makanan, Kosmetika dan Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya secara *Online*;
5. Karena tidak adanya Pedagang Besar Farmasi di Wilayah Sulawesi Barat, kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendistribusikan obat dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dilakukan dengan menggunakan mobil kanvas tanpa disertai dokumen pengiriman obat;
6. Peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) dan penyalahgunaan obat semakin marak terjadi, distribusi OOT tersebut dilakukan oleh orang perorangan, bukan oleh sarana yang berhak;
7. Balai POM di Mamuju saat ini belum mempunyai laboratorium pengujian, sehingga pengujian laboratorium terhadap sampel harus di kerjakan di Balai Besar POM di Makassar.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai POM di Mamuju dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai POM di Mamuju sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi Barat masih perlu terus dilakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin baik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

## II. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Mamuju mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2019. Rencana strategis BPOM di Mamuju yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*) 2018.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Balai POM di Mamuju dalam satu tahun tertentu, dan melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia.

Revisi Renstra Balai POM di Mamuju Tahun 2019 mengacu OTK baru merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga terjadi pada Revisi Renstra BPOM ini, yang semula *Logical Framework* menjadi *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

## 2.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Tekhnis dari Badan POM di Daerah dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, kemanfaatan/ khasiat obat dan makanan tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan diwilayah Propinsi Sulawesi Barat, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Filosofis Badan POM yaitu :

*“BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya secara independen, efektif, dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat”.*

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi Badan POM di daerah sebagaimana harapan dalam definisi filosofis tersebut memerlukan konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain diperlukan sebuah transformasi bagi Badan POM yang selanjutnya juga harus diikuti dengan berbagai perubahan yang menyertainya.



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara terfragmentasi;</li> <li>2. Keterbatasan akses pengawasan pada fasyankes, pelaku usaha kefarmasian dan makanan;</li> <li>3. Tugas dan fungsi UPT terbatas;</li> <li>4. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas UPT;</li> <li>5. Orientasi kinerja terbatas pada output.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara <i>full spectrum</i>;</li> <li>2. Memiliki akses pengawasan pada fasyankes, pelaku usaha kefarmasian dan makanan</li> <li>3. Penguatan UPT;</li> <li>4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT -&gt; <i>people, process, infrastructure</i>;</li> <li>5. Orientasi kinerja pada <i>outcome</i> dan <i>impact</i>;</li> <li>6. Penguatan penindakan dengan efek jera.</li> </ol>
--	--

Gambar 4. Transformasi BPOM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia termasuk Balai POM di Mamuju.

## Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka Badan POM telah menetapkan Visi BPOM 2015-2019 yaitu: "Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa".

### Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

## **M i s i**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

❖ **Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko Untuk Melindungi Masyarakat**

Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Sulawesi Barat khususnya merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup perkuatan standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan produk Obat dan Makanan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di Wilayah Propinsi Sulawesi Barat, Menyadari kompleksnya tugas yang diemban, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Mamuju akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis, antara lain pada pengawasan sarana dan produk Obat dan Makanan yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Barat.

❖ **Mendorong Kapasitas Dan Komitmen Pelaku Usaha Dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat Dan Makanan Serta Memperkuat Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan**

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, Balai POM di Mamuju harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman,

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Mamuju melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat di Wilayah Propinsi Sulawesi Barat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 7 dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 5. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

#### ❖ Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Badan POM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini

terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut Balai POM di Mamuju harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, Balai POM di Mamuju sebagai UPT Badan POM di Daerah yang merupakan suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi Badan POM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan POM yang harus dilaksanakan oleh seluruh UPT yang tersebar diseluruh Wilayah Indonesia. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat Badan POM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat di Wilayah Propinsi Sulawesi Barat dengan optimal

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka Balai POM di Mamuju perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

## Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Balai POM di Mamuju menjadi semangat bagi seluruh anggota Balai POM di Mamuju dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

### ❖ **Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

### ❖ **Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

❖ **Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

❖ **Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

❖ **Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

❖ **Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

## Tujuan

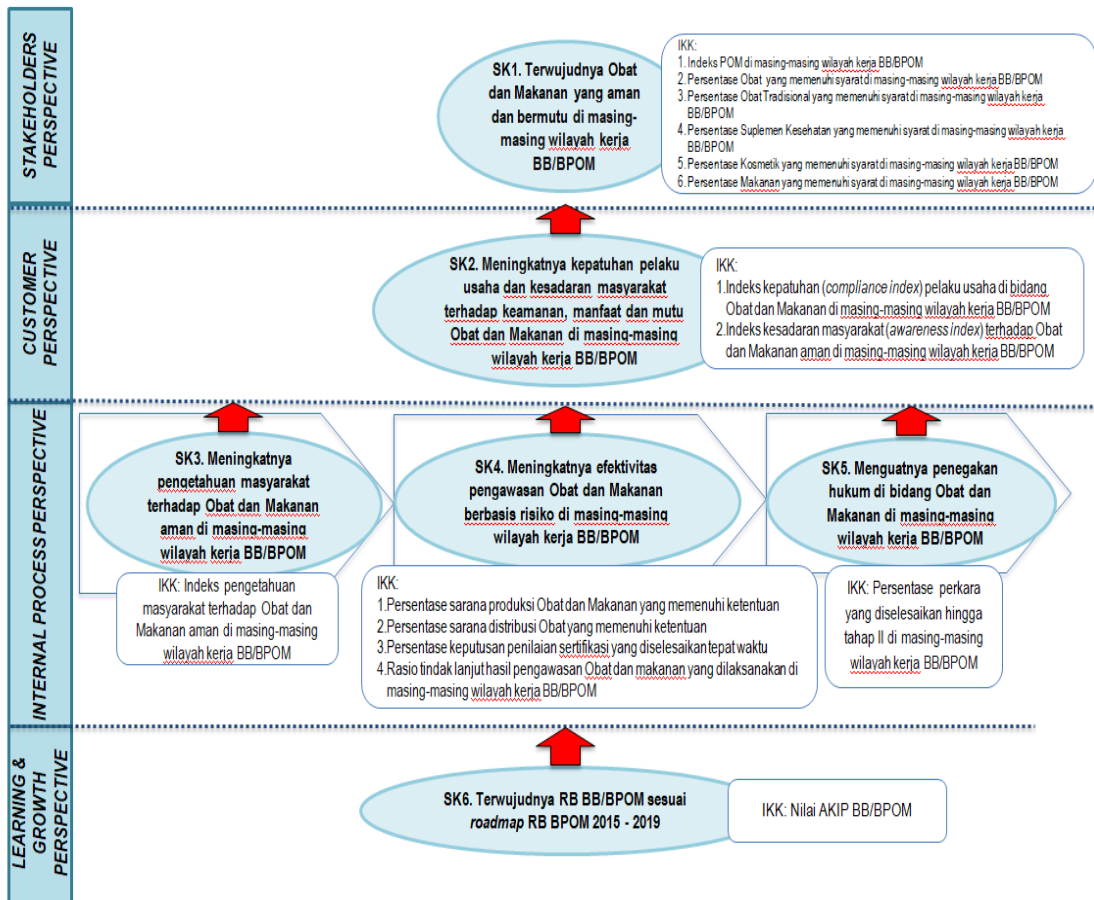
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

## Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Mamuju dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Mamuju. Dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun (2017-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Mamuju akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Balai Besar/Balai POM berikut:

## PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/ BALAI POM



Gambar 6. Peta Strategi Level II BB/BPOM

### 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dimasing-masing wilayah kerja BB/BPOM

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Mamuju tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Mamuju merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, penguatan standardisasi yang merupakan fungsi penguatan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan membentuk TIM terpadu dan Perjanjian Kerjasama dengan Lintas Sektor terkait implementasi Inpres No 03 Tahun 2017. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan

standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, Pengawasan sebelum beredar (*pre-market*) dalam hal ini pre market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu tidak termasuk penyusunan standard. Untuk Izin MD Penilaian dilakukan terpusat dan didaftar secara online oleh konsumen akan tetapi rekomendasi terkait penilaian sarana dilakukan oleh Balai POM di Mamuju untuk wilayah Propinsi Sulawesi Barat dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional sedangkan produk PIRT rekomendasi penilaian sarana dilakukan oleh Balai POM di Mamuju dan Izin edarnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis Balai POM di Mamuju, maka indikatornya adalah :

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah BPOM di Mamuju, dengan target **71** pada akhir tahun 2019.
- b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah Masing-masing BB/BPOM, dengan target **94%** pada akhir tahun 2019.
- c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah Masing-masing BB/BPOM, dengan target **84%** pada akhir tahun 2019.

- d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat diwilayah Masing-masing BB/BPOM, dengan target **93%** pada akhir tahun 2019.
- e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat diwilayah Masing-masing BB/BPOM, dengan target **87%** pada akhir tahun 2019.
- f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diwilayah Masing-masing BB/BPOM, dengan target **80%** pada akhir tahun 2019.

**2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan dimasing-masing wilayah kerja BB/BPOM**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Balai POM di Mamuju bertugas melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Mamuju melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah Masing-masing BB/BPOM, dengan target 61% pada akhir 2019;
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Masing-masing BB/BPOM, dengan target 66% pada akhir 2019.

### 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Masing-masing BB/BPOM, dengan target 61% pada akhir 2019.

### 4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di wilayah Propinsi Sulawesi Barat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Mamuju, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat

karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah

1. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM, dengan target **42%** pada akhir 2019
2. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM, dengan target **50%** pada akhir 2019
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target **85%** pada akhir 2019.
4. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan, dengan target **60%** pada akhir 2019.

#### **5. Menguatnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Mamuju melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai adalah Persentase jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM, dengan target **50%** pada akhir 2019.

#### **6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BB/BPOM sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai POM di Mamuju berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani

yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Mamuju akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2015-2019, Balai POM di Mamuju berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Mamuju untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

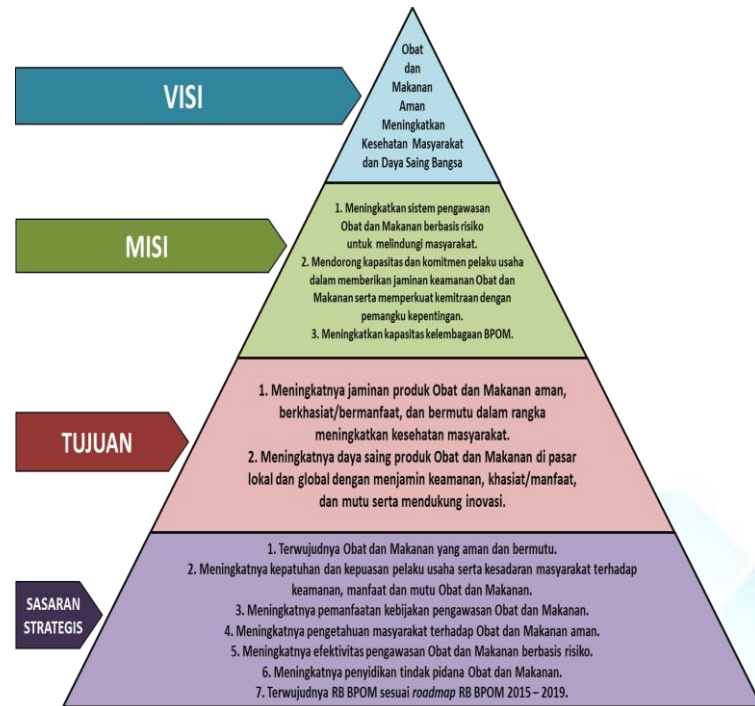
Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Mamuju, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

a. Nilai AKIP Balai POM di Mamuju, dengan target **81** pada akhir 2019.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Mamuju periode 2017-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai POM di Mamuju periode 2017-2019

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM serta mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA), dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 12 (Dua belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja untuk Balai Besar/Balai POM diseluruh Indonesia

Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM tergambar dalam tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2017 – 2018 (OTK Lama)

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2017	2018
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	93
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80	83
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	88	92
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	78	80
	Persentase Pangan yang memenuhi syarat	80	83
	Tingkat Kepuasan Masyarakat	60	65

	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan Komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	2	4
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM	Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju dari Badan POM	A	A
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513	513
Meningkatnya Kualitas yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,41	7,41
Meningkatnya Kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77	13,77
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	1,00	3,00
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	19	19
	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	2	4
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Mamuju</b>			
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	30	30
Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	9

**Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)**

Sasaran Strategis	Indikator	2018	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	70	71
	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	93	94
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	83	84
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah	83	87

	kerja BB/BPOM		
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	92	93
	<b>Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM</b>	<b>83</b>	<b>80</b>
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	60	61
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	-	66
<b>Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM</b>	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	60	61
<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat</b>	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30	42
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	40	50
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80	85
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	50	60
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	50	50
Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BB/BPOM	81	81

Tabel 1. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai POM di Mamuju tahun 2017-2018 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/BPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Sedangkan tabel 2 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM

Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## Kegiatan Balai POM di Mamuju Dalam Mendukung 6 Sasaran Strategi

1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat
2. Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
3. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan/ Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha OT, Kosmetik dan SK
4. Penilaian Keamanan Pangan
5. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan/ Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Pangan Olahan
6. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
7. Surveilen dan Promosi Keamanan Pangan
8. Pemeriksaan secara Laboratorium, yakni Pengujian dan Penilaian mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan Obat dan Makanan
9. Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan Makanan
10. Koordinasi Kegiatan Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
11. Koordinasi Perumusan Renstra
12. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM ASN
13. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
14. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi
15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur.

Pengawasan yang dilakukan oleh BB/Balai POM mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis Badan POM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.

Kinerja kegiatan tersebut diatas diukur dengan indikator:

- a. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target **94%** pada akhir tahun 2019.
- b. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target **84%** pada akhir tahun 2019.
- c. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target **93%** pada akhir tahun 2019.
- d. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target **87%** pada akhir tahun 2019.
- e. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target **80%** pada akhir tahun 2019.
- f. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **42%** pada akhir tahun 2019.
- g. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **50%** pada akhir tahun 2019.
- h. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target **85%** pada akhir tahun 2019.
- i. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM, dengan target **60%** pada akhir tahun 2019.
- j. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II, dengan target **50%** pada akhir tahun 2019.
- k. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target **61%** pada akhir tahun 2019.
- l. Nilai AKIP Balai, dengan target **81** pada akhir tahun 2019

## Kerangka Pendanaan

Sesuai Target Kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka Kerangka Pendanaan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Balai POM di Mamuju tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kerangka Pendanaan (OTK Lama)

Sasaran Strategis	Indikator	Target Keuangan	
		2017	2018
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	279,082,075	317,894,250
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	194,589,337	221,651,036
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	391,739,060	446,218,534

	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	64,009,650	72,911,525
	Persentase Pangan yang memenuhi syarat	436,265,877	489,622,655
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	486,549,500	400,018,000
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan Komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	486,549,500	400,018,000
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM	Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju dari Badan POM	9,699,105,000	23,824,292,000
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	642,750,000	678,844,000
Meningkatnya Kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	52,504,000	120,000,000
Meningkatnya Kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	471,387,000	584,026,000
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	199,045,000	165,428,000
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	700,103,000	181,623,000
	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	272,996,000	618,413,000
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Mamuju</b>			
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	8,294,808,000	23,096,303,000
Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1,404,297,000	727,989,000

Tabel 4. Kerangka Pendanaan (OTK Baru)

Sasaran Strategis	Indikator	Target Keuangan	
		2018	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	108,510,200	1,194,809,000
	Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	119,788,650	1,417,367,400
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,851,900	861,759,400
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	27,950,700	283,473,500
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	167,704,450	1,734,857,500
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	178,684,500	1,699,710,100
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	90,811,500	412,500,000
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	644,404,500	1,955,298,000
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	113,465,600	106,322,100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	54,440,000	108,277,000
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	259,043,000	462,696,000
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	54,440,000	56,373,000
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	259,043,000	310,896,000
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	219,790,000	242,705,000

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	23,790,698,000	5,260,382,000
---	--------------------------------	----------------	---------------

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai POM di Mamuju, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat Badan POM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerja samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai POM di Mamuju dalam mendukung program-program Badan POM. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai POM di Mamuju. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Balai POM di Mamuju sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Balai POM di Mamuju tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik, Balai POM di Mamuju juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai POM di Mamuju bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama

Balai POM di Mamuju bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju dalam pengawasan Obat dan Makanan.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Mamuju sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Mamuju) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2018 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai atau setelah alokasi anggaran. Adapun Lampiran Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513.00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7.41
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13.77
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3.00

5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	30.00
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang di laporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9.00
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	19.00
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	4.00
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70.00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93.00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	92.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83.00
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	30.00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40.00

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	80.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81.00

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja triwulanan dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu telah dibuat rencana aksi Perjanjian Kinerja triwulan, sehingga capaian kinerja bukan dikumpulkan pada saat penyusunan laporan kinerja tetapi dimonitor dan dievaluasi per triwulan.

## Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Setiap akhir periode kegiatan instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Adapun cara pengukuran dan Kriteria pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja :**

Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus

$$:\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 1}$$

Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 2}$$

**Tabel 6. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018**

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	100% <math>\chi \leq 125\%</math>
Baik	100%
Cukup	75% <math>\leq \chi < 100\%</math>
Kurang	<math>\chi < 75\%</math>
Tidak dapat disimpulkan	<math>\chi > 125\%</math>

Penetapan ini bertujuan untuk :

- Mencegah rendahnya penetapan target kinerja tahunan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Me-review penetapan target kinerja tahunan;

## III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Setelah diberlakukannya OTK baru, Penetapan Kinerja Balai POM di Mamuju tahun 2018 terdapat 6 sasaran strategis dengan 15 indikator kinerja yang dijabarkan dalam komponen kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018 (OTK Baru)

NO.	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	48,80	69,71	CUKUP
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00	99,10	106,56	
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	80,26	96,70	
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	100,00	120,48	
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	92,00	88,24	95,91	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	69,33	83,53	
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	25,76	42,93	KURANG
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	63,18	105,30	MEMUASKAN
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100,00	96,71	96,71	KURANG
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	30,00	13,89	46,30	
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja	40,00	3,45	8,63	

		Balai POM di Mamuju				
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	80,00	50,00	62,50	
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	60,53	121,06	
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	25,00	50,00	KURANG
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81,00	68,80	84,94	CUKUP

Tabel 8. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	TARGET 2019
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	48,80	71,00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00	99,10	94,00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	80,26	84,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	100,00	87,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	92,00	88,24	93,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	69,33	80,00
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	25,76	61,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	63,18	61,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100,00	96,71	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai	30,00	13,89	42,00

		POM di Mamuju			
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40,00	3,45	50,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	80,00	50,00	85,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	60,53	60,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	25,00	50,00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81,00	68,80	81,00

**Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan balai pembandingan**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BALAI POM DI MAMUJU	CAPAIAN BALAI POM DI PANGKALPINANG	CAPAIAN BALAI POM DI GORONTALO
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.	95,48 %	89,61 %	103,51 %
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	42,93 %	116,12 %	58,53 %
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman	105,30%	99,62 %	136,62 %
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	67,04%	116,64%	64,96 %
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	50%	100%	40 %
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM	84,94%	94,32%	93,56 %

Untuk sasaran strategis pertama, yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, capaian Balai POM di Mamuju berada di atas dari Balai POM di Pangkal Pinang dan dibawah Balai POM di Gorontalo. Sebagai Unit Pelaksana teknis yang dibentuk pada tahun 2016, pencapaian Balai POM di mamuju lebih tinggi jika dibandingkan Balai POM Pangkalpinang yang telah lama terbentuk. Hal ini mencerminkan kerja nyata Balai POM di Mamuju yang terus berusaha konsisten dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan Bermutu di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk sasaran strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan”, pencapaian Balai POM di Mamuju berada dibawah Balai POM Pangkal Pinang dan Balai POM di Gorontalo, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Mamuju perlu lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam upaya mengawal dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat, sehingga nilai indeks kepatuhan pelaku usaha Balai POM di mamuju dapat meningkat.

Untuk sasaran strategis ketiga “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman”, pencapaian Balai POM di Mamuju lebih tinggi dibandingkan Balai POM di Pangkalpinang dan lebih rendah dari Balai POM di Gorontalo, hal ini memperlihatkan terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, yang diperlihatkan oleh nilai indeks pengetahuan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yaitu 63,18 dari target 60. Hal ini karena gencarnya Balai POM di Mamuju melakukan KIE kepada masyarakat, baik melalui dialog interaktif di media Televisi, radio dan emdia cetak melalui Penyampaian Informasi dan Pameran.

Untuk sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko”, pencapaian Balai POM di Mamuju lebih rendah dibandingkan Balai POM di Pangkal Pinang tetapi lebih tinggi dibandingkan Balai POM di Gorontalo, hal ini memperlihatkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Balai POM di Mamuju selalu berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini juga tidak lepas dari peranan stakeholder dan lintas sektor terkait yang senantiasa kooperatif dalam berbagai kegiatan-kegiatan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju.

Untuk sasaran strategis ke lima “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM”, pencapaian Balai POM di Mamuju berada diatas Balai POM di Gorontalo dan dibawah pencapaian Balai POM di Pangkal Pinang, adanya keterbatasan jumlah SDM yaitu jumlah PPNS hanya satu orang di Balai POM di Mamuju, diharapkan dengan bertambahnya jumlah PPNS dapat mengoptimalkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Pada sasaran strategis ke enam “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM”, capaian ketiga Balai berada dalam kriteria Cukup, dan tidak jauh berbeda. Perbedaan nilai capaian ini karena menggunakan indikator nilai AKIP, dimana Balai POM di pangkal Pinang dan Balai POM di Gorontalo memperoleh nilai AKIP yang lebih tinggi dari Balai POM di mamuju. Untuk itu, Balai POM di Mamuju senantiasa berusaha meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh staf Balai POM di Mamuju terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Mamuju; dan mendorong peningkatan manajemen dan

akuntabilitas kinerja Balai POM di Mamuju melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan setiap bulan sehingga setiap kendala maupun pencapaian yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti untuk mendukung pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Mamuju, sebagai berikut :

## **SASARAN STRATEGIS 1**

*“Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat”*

Pengukuran kinerja dari Sasaran Strategis 1 (SS1) didasarkan pada penilaian terhadap 6 indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

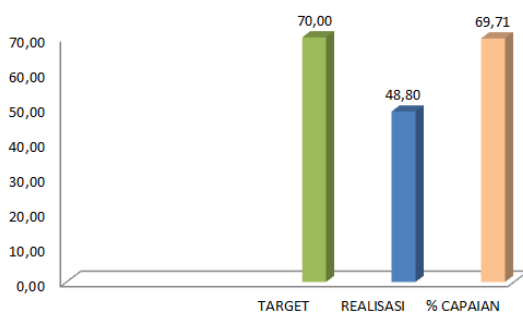
**Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1 BPOM di Mamuju Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	48,80	69,71	Kurang
Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00	99,10	106,56	Memuaskan
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	80,26	96,70	Cukup
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	100,00	120,48	Memuaskan
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	92,00	88,24	95,91	Cukup
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	69,33	83,53	Cukup
Rata-rata			95,48	Cukup

Persentase capaian kinerja 6 (lima) Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 1 tahun 2018 berkisar antara 69,71% s/d 120,48%. Ke enam indikator kinerja yang diukur di atas rata-rata memperoleh kriteria “Cukup”. Pencapaian tertinggi terdapat pada Indikator Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat, hal ini karena seluruh sampel Suplemen kesehatan yang telah diuji tidak ditemukan yang TMS, baik dari segi penandaan maupun pengujian. Sedangkan pencapaian yang belum optimal yaitu Indeks POM dengan nilai 69,71 %. Untuk itu Balai POM di Mamuju akan terus berupaya mengoptimalkan tingkat efektifitas kinerja dalam hal Pengawasan Obat dan Makanan sehingga nilai-nilai indeks POM dapat meningkat.

## 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk

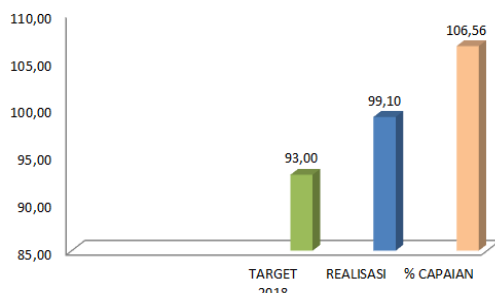


Gambar 8. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks POM

menilai tingkat efektifitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk

indeks. Realisasi Indeks POM Balai POM Mamuju adalah 48,80 dengan target 70,00 sehingga diperoleh capaian 69,71%.Capaian ini masih tergolong rendah dibandingkan Balai POM di Pangkalpinang maupun Balai POM di Gorontalo, sehingga Balai POM di Mamuju akan senantiasa mengoptimalkan kinerja dalam hal Pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan nilai indeks POM dan mencapai target nilai indeks POM di Akhir 2019 yaitu 71.

## 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

Realisasi pemenuhan target Persentase Obat yang memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 99,10% dengan capaian 106,56%,dihitung dari perbandingan jumlah produk obat yang memenuhi syarat yaitu 110 yang merupakan hasil pengurangan dari total jumlah sampling dikurangi total jumlah produk TMS yaitu 1 sampel terhadap jumlah seluruh produk obat yang diuji(111) sampel.

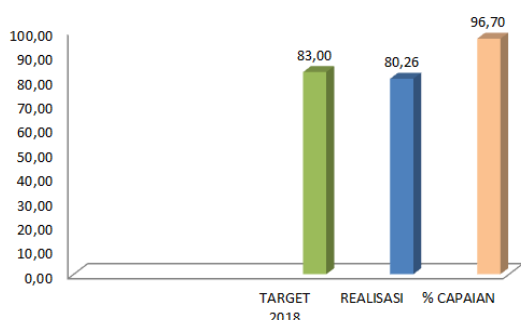
Produk obat yang diuji meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika serta ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium. Pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 93%, dan tidak menutup kemungkinan pada akhir tahun 2019 dapat diprediksikan akan mencapai target bahkan melebihi target yang diberikan yaitu 94%, hal ini tidak terlepas dari upaya Balai POM di Mamuju dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, yang antara lain melalui :

- Pemberian sanksi administratif maupun *projustitia* kepada sarana distribusi resmi dan tidak resmi yang menjual bebas produk obat keras tanpa hak dan kewenangan.
- Melakukan KIE kepada masyarakat melalui kegiatan penyebaran informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, pelajar, organisasi pemuda, Ibu-ibu PKK, dan

dharma wanita dan diharapkan dapat meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat di lingkungan dimana mereka berada.

Untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat yang sampai kepada masyarakat tetap baik, maka perlu dilakukan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan obat, agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) secara konsisten.

### 3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 10. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

Realisasi pemenuhan target Persentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 80,26% dari target 83%, dengan capaian 96,70%, dihitung dari perbandingan jumlah produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat yaitu 61 sampel, yang merupakan hasil pengurangan dari total jumlah sampling OT yaitu 76 sampel dikurangi total jumlah produk TMS 15 sampel.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian presentase Obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 yaitu 125%, hal ini karena perubahan renstra Balai POM dimamuju dengan adanya perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja, sehingga terdapat perbedaan cara perhitungan capaian. Dengan bertambahnya jumlah SDM dan sarana prasarana di Balai POM di Mamuju, maka diharapkan mampu memenuhi target yang diberikan dalam rencana strategis yaitu 84%.

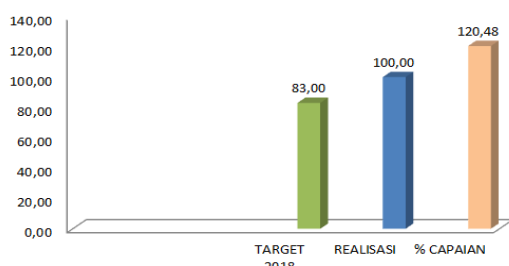
Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi target presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi barat antara lain :

- Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran memproduksi dan/atau mengedarkan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), tidak memiliki ijin edarmaupun yang telah dibatalkan Nomor Izin Edarnya oleh Badan POM RI (*Public Warning* Badan POM RI);
- Pengawasan terhadap pelaku usaha obat tradisional baik produsen maupun distributor masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar obat tradisional yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, mutu dan khasiat;
- Penyebaran informasi dengan melakukan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik yang intensif oleh Balai POM di Mamuju kepada masyarakat tentang obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan khasiat, serta mensosialisasikan cara untuk mengetahui produk yang telah terdaftar di Badan POM RI dengan mengakses situs web [www.ceknie.pom.go.id](http://www.ceknie.pom.go.id);

- Melakukan Operasi Penindakan terhadap pelanggaran peredaran obat tradisional bersama pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan berfokus pada pemutusan mata rantai peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), tidak memiliki ijin edar maupun yang telah dibatalkan Nomor Izin Edarnya oleh Badan POM RI.

#### 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

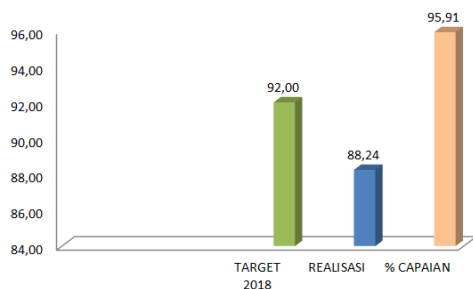
Realisasi pemenuhan target Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 100,0% dengan capaian 120,48%. Dari jumlah total sampel Suplemen kesehatan yaitu 23 sampel, tidak ditemukan sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) baik dari segi pengujian maupun penandaan.

Balai POM di Mamuju telah berhasil melampaui target persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, hal ini diharapkan akan terus dipertahankan mengingat target di tahun 2019 bertambah menjadi 84% dan semakin maraknya peredaran Suplemen Kesehatan di masyarakat. Untuk menurunkan angka peredaran produk Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan, Balai POM di Mamuju telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Suplemen Kesehatan yang memenuhi standar dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik;
- Pengawasan terhadap pelaku usaha baik produsen maupun distributor Suplemen Kesehatan yang masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar produk yang beredar memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat.

- Penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun sarana distribusi yang melakukan pelanggaran.
- Penyebaran Informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* produk Suplemen Kesehatan yang diterbitkan oleh Badan POM RI

## 5. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 12. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kosmetika yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

Realisasi pemenuhan target Persentase Kosmetika yang memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 88,24% dengan capaian 95,91%, diperoleh dari perbandingan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat yaitu 135 sampel dengan jumlah total kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan sebanyak 153 sampel. Di era digital dimana semakin banyak transaksi jual beli kosmetika

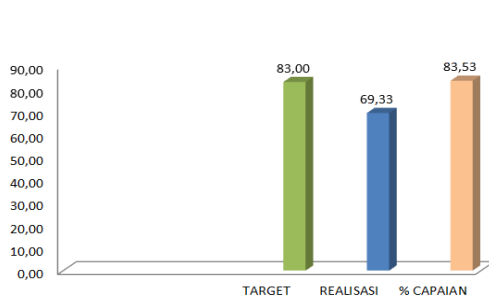
secara *on-line*, terutama dalam wilayah kerja Balai POM di Mamuju menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan sistem pengawasan dalam mewujudkan Kosmetika yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi barat. Target persentase kosmetika yang memenuhi syarat pada tahun 2019 adalah 94%, oleh karena itu Balai POM di Mamuju akan lebih meningkatkan kinerja dalam mencapai target. Beberapa Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kosmetik yang tidak memenuhi syarat diperlukan antara lain :

- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetika yang memenuhi standar, karena masyarakat cenderung menggunakan kosmetika dengan hasil yang instan untuk sediaan perawatan kulit (memutihkan, mencerahkan, mengencangkan, menghaluskan), warna yang mencolok pada sediaan rias wajah (pewarna dilarang), kosmetika tanpa ijin edar (*illegal*) baik impor maupun lokal;
- Pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetika baik produsen maupun distributor masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar kosmetika yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat;
- Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, tidak memiliki izin edar dan yang sudah ditarik dari peredaran berdasarkan *Public Warning* Badan POM RI;
- Penyebaran informasi dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak

maupun elektronik terhadap penggunaan kosmetika yang memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat;

- Penyebaran Informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* produk kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM RI;
- Melakukan Operasi Penindakan terhadap pelanggaran peredaran kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Melakukan Operasi Terpadu dengan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM RI khusus untuk komoditi kosmetika.

## 6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 13. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat

Realisasi pemenuhan target Persentase Makanan yang memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 69,33% dengan capaian 83,53%, dimana jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 104 sampel dengan total sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 150 sampel. Beberapa sampel makanan yang tidak memenuhi syarat diantaranya positif

mengandung Pewarna yang dilarang untuk pangan (pewarna tekstil), Pengawet yang dilarang dalam pangan (Formalin), Bahan Tambahan Pangan (pengawet dan pemanis) melebihi batas yang ditentukan serta positif mengandung Pemanis tanpa mencantumkan pada label. Mengingat begitu banyak makanan yang tidak memenuhi syarat, target Balai POM di Mamuju untuk persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi diturunkan dari 83% menjadi 80% di tahun 2019. Namun demikian Balai POM di Mamuju akan tetap berupaya maksimal dalam mengawasi peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat; diantaranya melalui:

- Penyebaran informasi yang intensif melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik kepada masyarakat terhadap makanan yang bermutu, aman dan bermanfaat;
- Pemberdayaan masyarakat melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dengan melibatkan komunitas sekolah, Industri Rumah Tangga (IRTP), Ritel, PKK dan Kader Keamanan Pangan Desa.
- Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap mutu produk makanan termasuk PIAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang beredar mendorong pelaku usaha/produsen makanan untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar;

Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *premarket* dan *post market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat pada meningkatnya tingkatkepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat;

- Penerapan sanksi administrasi maupun *Projustitia* pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.

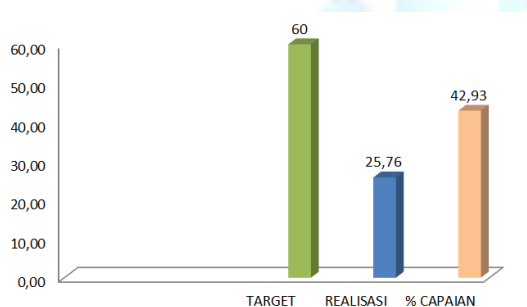
## SASARAN STRATEGIS 2

*“Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”*

Pengukuran kinerja dari Sasaran Strategis 2 didasarkan pada penilaian terhadap indikator Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 BPOM di Mamuju Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	25,76	42,93	Kurang



Gambar 14. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha.

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan

Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Nilai Indeks kepatuhan Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 25,76 % dengan persentase capaian yaitu 42,93 %. Dari hasil capaian yang diperoleh masih tergolong dalam kriteria kurang, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sampai saat ini, di wilayah kerja Balai POM di Mamuju hanya terdapat sarana produksi pangan,

adapun faktor finansial dari pelaku usaha yang kurang mendukung untuk memperbaiki temuan-temuan petugas ketika melakukan pemeriksaan sarana Produksi pangan.

Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, Balai POM di Mamuju senantiasa menindaklanjuti hasil temuan pengawasan sarana sesuai ketentuan yang berlaku baik dalam hal pembinaan dan atau peringatan. Hal ini diharapkan mampu membuat Pelaku usaha dapat memperbaiki temuan petugas dan diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks kepatuhan pelaku usaha.

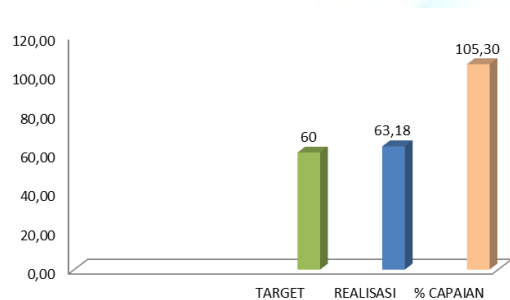
### SASARAN STRATEGIS 3

“Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Strategis 3 didasarkan pada penilaian terhadap indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 3 BPOM di Mamuju Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	63,18	105,30	Memuaskan



Gambar 15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepatuhan Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh

sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Hasil survei menunjukkan Balai POM di Mamuju memperoleh nilai indeks pengetahuan 63,18 % dari target 60%. Sehingga diperoleh persen capaian 105,30 % dengan kategori memuaskan. Pencapaian ini diharapkan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan mengingat target di tahun 2019 adalah

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- Balai POM di Mamuju senantiasa meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan mengadakan Penyampaian Informasi maupun KIE terkait Obat dan Makanan
- Penyebaran informasi yang intensif melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik kepada masyarakat terhadap makanan yang bermutu, aman dan bermanfaat;
- Pemberdayaan masyarakat melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dengan melibatkan komunitas sekolah, Industri Rumah Tangga (IRTP), Ritel, PKK dan Kader Keamanan Pangan Desa.

## SASARAN STRATEGIS 4

“Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat”

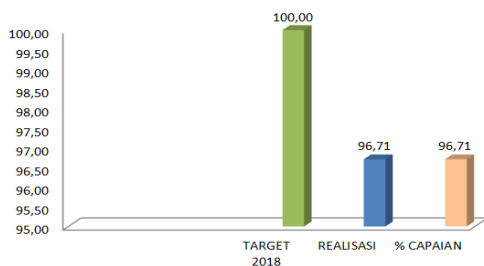
Pengukuran kinerja dari Sasaran Strategis 4 (SS1) didasarkan pada penilaian terhadap 5 indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 4 BPOM di Mamuju Tahun 2018

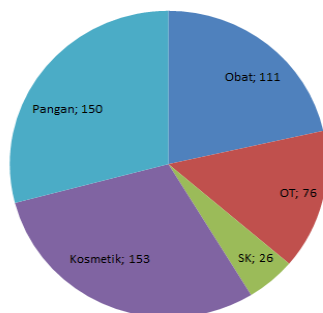
SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100,00	96,71	96,71	Cukup
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	30,00	13,89	46,30	Kurang
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40,00	3,45	8,63	Kurang
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	80,00	50,00	62,50	Kurang
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	60,53	121,06	Memuaskan
Rata-rata				67,04%	Kurang

Persentase capaian kinerja 5 (lima) Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 4tahun 2018 berkisar antara 8,63% s/d 121,06 %. Ke enam indikator kinerja yang diukur di atas rata-rata memperoleh kriteria “Kurang”. Capaian tertinggi diperlihatkan pada Indikator Rasio tindak Lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 121,06% hal ini memperlihatkan kooperatifnya lintas sektor terutama Dinas kesehatan dari tiap kabupaten yang diberi tembusan surat Peringatan terhadap sarana yang segera menindak lanjuti surat dari Balai POM di Mamuju terutama terhadap sarana produksi makanan (PIRT). Capaian yang masih rendah yaitu pada indikator Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 8,63%, Balai POM dimamuju senantiasa berusaha untuk membina dan memberi peringatan kepada pemilik sarana jika terdapat temuan-temuan yang harus diperbaiki agar sarana distribusi obat tersebut dapat memenuhi Ketentuan.

### 1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 16. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat



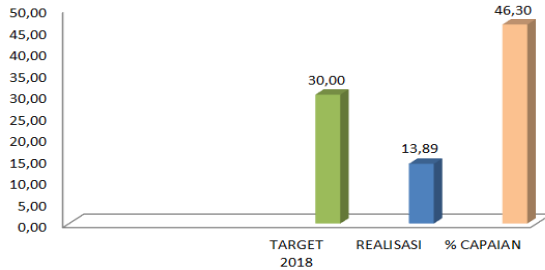
Gambar 17. Jumlah Total Sampel tahun 2018

Realisasi pemenuhan target pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat adalah 96,71% dengan capaian 96,71%%, dihitung dari perbandingan Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar yaitu 499 sampel, terhadap jumlah yang harus diuji yaitu 516 dengan rincian Obat (111 sampel), Obat Tradisional (76 sampel), Kosmetika (153 sampel) Suplemen Kesehatan (26 sampel) dan pangan (150 sampel). Namun masih ada 17 sampel yang terdiri atas 14 sampel obat dan 3 sampel Suplemen Kesehatan yang belum diuji (*carry over*) ke tahun 2019 diakibatkan adanya beberapa kendala yang terjadi selama proses pengujian di laboratorium,

diantaranya :

- Balai POM di Mamuju belum mempunyai fasilitas laboratorium pengujian sehingga untuk melaksanakan fungsi pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Makassar terutama sampel yang menggunakan alat laboratorium seperti HPLC dan GC bergantung pada operator penanggungjawab alat tersebut;
- Minimnya SDM di pengujian pada Balai POM di Mamuju menyebabkan ada beberapa item sampel yang tidak diuji di tahun 2018.

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.



Gambar 18. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 13,89 % dengan capaian 46,30%, dihitung dari perbandingan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 5 sarana, terhadap jumlah sarana produksi obat dan makanan yang

diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa yaitu 36 sarana.

Berikut tabel Data sarana dan cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Tahun 2018:

Tabel 14. Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Diwilayah Sulawesi Barat Tahun 2018

SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA		MEMENUHI KETENTUAN	%
	DIWILAYAH SULBAR	YANG DIPERIKSA		
Obat	0	0	0	0
Obat Tradisional	0	0	0	0
Kosmetika	0	0	0	0
Pangan MD	3	3	2	66.67
Pangan IRTP	213	33	3	9.1
Jumlah	217	36	5	13.89

Dalam perjanjian kinerja ditetapkan sebanyak 16 sarana produksi untuk diperiksa, namun setelah dilakukan pemeriksaan sarana ternyata realisasi capaian sarana yang diperiksa melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

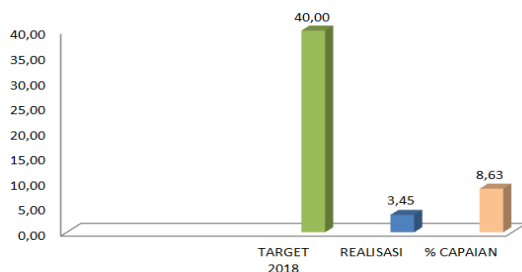
- Belum optimalnya perencanaan target capaian karena Balai POM di Mamuju belum mempunyai *baseline* data yang tepat.
- Adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pembinaan berupa Bimbingan Tehnis, pendampingan dan percepatan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga (PIRT) serta adanya Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) khususnya komunitas Industri Rumah Tangga pada triwulan IV

menyebabkan realisasi capaian target cakupan pengawasan sarana produksi melebihi target.

Sebagai rencana tindak lanjut untuk mengantisipasi hal tersebut, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- *Me-review* kembali target capaian cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan
- Pemutakhiran data sarana produksi Obat dan Makanan yang terdapat di wilayah Sulawesi Barat
- Lebih cermat dalam perencanaan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

### 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju



Gambar 19. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju.

Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 3,45 % dengan capaian 8,63%, dihitung dari perbandingan jumlah sarana distribusi obat diperiksa yang memenuhi ketentuan yaitu 2 sarana, terhadap jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa sebanyak 58 sarana. Balai POM di Mamuju senantiasa

berusaha untuk membina dan memberi peringatan kepada pemilik sarana jika terdapat temuan-temuan yang harus diperbaiki agar sarana distribusi obat tersebut dapat memenuhi Ketentuan.

Cakupan pengawasan sarana distribusi obat yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Sarana distribusi Obat dan NAPZA sebanyak 274 sarana, dan petugas BPOM Mamuju telah memeriksa 58 Sarana dengan hasil 2 sarana yang memenuhi ketentuan dan 56 sarana yang tidak memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan fisik bangunan; Berikut ditampilkan jumlah sarana dan Cakupan pengawasan sarana distribusi obat di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 15. Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Diwilayah Sulawesi Barat Tahun 2018

SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA	
	DIWILAYAH SULBAR	YANG DIPERIKSA
GFK	7	4
Apotek	102	49
Toko Obat	38	1
Rumah Sakit	10	2
Puskesmas	97	1
Balai Pengobatan/Klinik	19	-
PBF	2	1
Jumlah	275	58

Ada beberapa sarana distribusi yang berada di kabupaten dengan kondisi geografis masih sulit dijangkau karena jarak tempuh yang jauh dan sarana transportasi belum memadai, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pengawasan pada sarana di daerah tersebut.

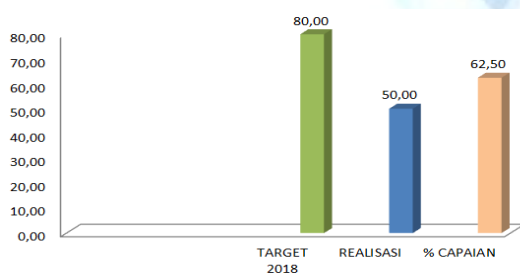
Sebagai rencana tindak lanjut untuk menyelaraskan target dengan realisasi, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- *Me-review* kembali target capaian cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan
- Melakukan pemutakhiran data sarana distribusi obat langsung pada stakeholder terkait di 6 (enam) kabupaten.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Terbatasnya tenaga pengawas di Balai POM di Mamujusehingga hanya bisa mengawasi 21% dari seluruh sarana distribusi obat yang ada di Sulawesi Barat yang jumlahnya 275 sarana.

#### 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat



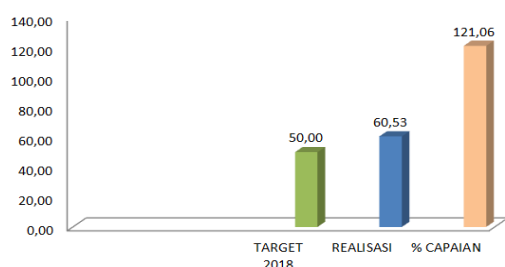
Gambar 20. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat adalah 50%, dengan capaian 62,50%. Dihitung dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu yaitu 1 sarana, terhadap jumlah

permohonan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan yaitu 2 sarana.

Dari 2 sarana yang memohon penilaian sertifikasi, yang dapat diselesaikan tepat waktu hanya 1 sarana, adapun 1 sarana yang tidak selesai karena sarana tersebut membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan (*timeline* sesuai SOP Balai POM di Mamuju adalah 30 HK), sehingga tidak termasuk kategori yang diselesaikan tepat waktu. Kondisi ini terjadi karena Petugas Balai POM di Mamuju harus melakukan beberapa kali audit terhadap temuan-temuan untuk dilakukan perbaikan oleh sarana tersebut, juga karena adanya pergantian manajemen pada sarana yang bersangkutan sehingga dokumen-dokumen yang dipersyaratkan juga harus diperbaharui.

#### 5. Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju



Gambar 21. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Realisasi Persentase Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 60,53 % dengan capaian 121,06 %, dihitung dari perbandingan jumlah tindak lanjut *feedback* dari pelaku usaha dan instansi terkait yaitu 23 *feedback* dari 38 rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha

dan instansi terkait. Capaian ini termasuk dalam kriteria memuaskan, hal ini menggambarkan kooperatifnya lintas sektor terutama Dinas kesehatan dari tiap kabupaten yang diberi tembusan surat Peringatan terhadap sarana yang segera menindak lanjuti surat dari Balai POM di Mamuju, khususnya terhadap terhadap sarana distribusi Obat dan produksi makanan (PIRT).

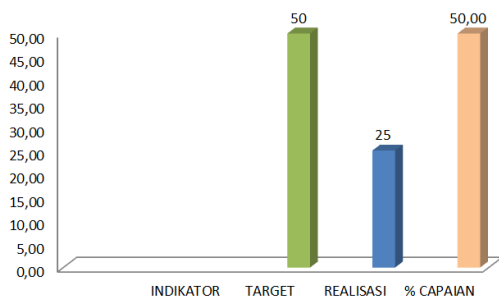
### SASARAN STRATEGIS 5

*“Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”*

Pengukuran kinerja dari Sasaran Strategis 5 didasarkan pada penilaian terhadap indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 5 BPOM di Mamuju Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	25,00	50,00	Kurang



Gambar 22. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini dilakukan menggunakan indikator kinerja Presentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM pada tahun 2018 dengan realisasi 25% dan capaian 50%. Target yang ditetapkan adalah 50% dari jumlah perkara diselesaikan hingga tahap II yaitu kasus di Kabupaten Polman dibidang Obat dimana pada proses penyidikan telah ditetapkan 2

(dua) orang sebagai tersangka dan dibuat dalam 1 (satu) berkas perkara, namun setelah dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Polman (Tahap 1) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi petunjuk (P19) agar berkas dijadikan 2 (dua) / di-split untuk masing-masing tersangka sehingga output dari kegiatan penyidikan atas 1 (satu) perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM di Mamuju menjadi 2 (dua) berkas perkara.

Total jumlah kasus yang sedang dalam proses penyidikan di balai POM di Mamuju yaitu 4 kasus termasuk carry over dari tahun 2017. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu masih terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani perkara. Balai POM di Mamuju hingga triwulan III hanya memiliki 1 orang PPNS untuk menangani 3 perkara diluar dari berbagai kegiatan lainnya dalam seksi pemeriksaan dan penyidikan, sertifikasi dan LIK (OTK) lama.

Untuk lebih meningkatkan kualitas capaian indikator ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- Kuantitas dan kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan;
- Peningkatan kualitas SDM personil pada bagian penyidikan dengan mengikuti Diklat penyidik (PPNS) dan Diklat Intelijen;
- Koordinasi yang lebih *intens* dengan unsur *Criminal Justice System* di daerah;

- Perlunya penambahan petugas (baik PPNS maupun intelijen), fasilitas transportasi, perlengkapan dan penunjang pelaksanaan investigasi.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian terhadap Indikator kegiatan ini antara lain :

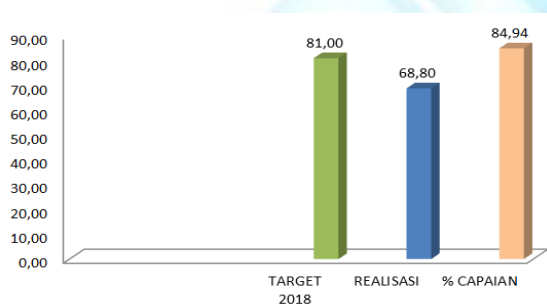
- Menambah jumlah PPNS dan intelijen melalui rekrutmen pegawai;
- Meningkatkan kompetensi PPNS dan intelijen yang ada dengan mengikuti pelatihan atau *workshop*, pertemuan investigasi awal dan penyegaran proses penyidikan;
- Meningkatkan koordinasi antar PPNS Badan POM RI, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing balai sebagai bahan pembandingan pada kegiatan investigasi awal dan operasi penindakan maupun dalam proses penyidikan.
- Konsultasi dengan Badan POM RI khususnya Deputi di Bidang Penindakan.

## SASARAN STRATEGIS 6

“Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategi 6 BPOM di Mamuju Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81,00	68,80	84,89	Cukup



Gambar 23. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

Pengukuran kinerja dari Sasaran Strategis 6 didasarkan pada penilaian terhadap Nilai AKIP Balai POM di Mamuju. Dimana Balai POM Mamuju memperoleh nilai AKIP 68,80 dari target yang telah ditentukan dalam renstra 2018 yaitu 81,00 sehingga persen pencapaiannya adalah 84,89%. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Balai POM di Mamuju untuk pencapaian indikator kinerja ini diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh staf Balai POM di Mamuju terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Mamuju;
2. Mendorong peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja Balai POM di Mamuju melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan setiap bulan sehingga setiap kendala maupun pencapaian yang

diperoleh dapat segera ditindaklanjuti untuk mendukung pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju

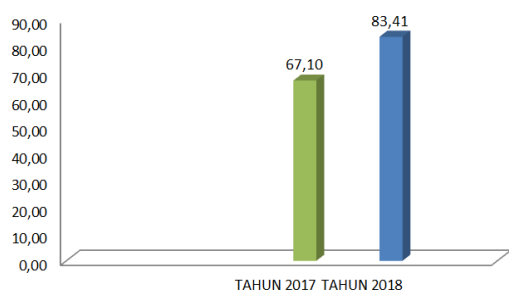
3. Meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rencana program kegiatan (penetapan target indikator kinerja)
4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-Performance* sebagai salah satu aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan POM yang merupakan sistem pengelolaan kinerja secara elektronik berbasis *Balance Scorecard* (BSC).
5. Meningkatkan kepedulian dan melakukan penyegaran secara berkala terkait pemahaman maupun implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi kepada seluruh komponen di Balai POM di Mamuju.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang target sasaran strategis 6 ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

## 3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 18. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	686.490.400	580.668.849	84,59
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	90.811.500	64.860.479	71,42
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	644.404.500	474.776.680	73,68
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	740.431.600	577.831.441	78,04
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	219.790.000	105.363.961	47,94
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	23.790.698.000	20.027.005.062	84,18
		26.172.626.000	21.830.506.472	83,41



Gambar 24. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 Balai POM di Mamuju adalah sebesar Rp. 26.172.626.000,-, realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.830.506.472,- atau 83,41%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 67,10% dengan presentase kenaikan sebesar 16,31%.

Balai POM di Mamuju telah berupaya mengelola anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan pengelolaan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Mamuju dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran beserta pemenuhan kegiatan secara berkala.

- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Faktor penyebab belum optimalnya realisasi anggaran antara lain :

1. Belanja Pegawai : Adanya penambahan pagu belanja pegawai melalui revisi antar satker untuk memenuhi kebutuhan kenaikan tunjangan kinerja (80%) ditahun berjalan dengan jumlah lebih besar dari kebutuhan jumlah pegawai yang dimiliki.
2. Belanja Barang :
  - a. Keterbatasan SDM dan Kompetensi yang dimiliki di semua bidang menyebabkan realisasi kegiatan dan anggaran belanja barang operasional kurang maksimal
  - b. Adanya restrukturisasi OTK Baru yang berdampak pergantian Pejabat sehingga memerlukan waktu untuk menelaah kebijakan sebelumnya.
  - c. Adanya revisi anggaran dengan mekanisme DJA yang memerlukan waktu lama pengesahannya sehingga realisasi anggaran beberapa kegiatan mengalami keterlambatan.
  - d. Pejabat Pengadaan masih diperbantukan dari satker luar (Dinas PU) sehingga memerlukan waktu dalam berkoordinasi.
3. Belanja Modal : adanya belanja modal yang dianggarkan di tahun 2018 yang tidak direalisasikan dan cukup signifikan mempengaruhi realisasi anggaran yaitu :
  - Pekerjaan *cut fill* dan pematangan lahan tidak dapat direalisasikan karena adanya Hasil temuan Audit Joint Inspektorat dan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yaitu kelebihan bayar atau kekurangan volume pekerjaan di lapangan
  - Realisasi Kontrak Jasa Managemen Konstruksi tidak 100 % kerana prestasi pekerjaan dilapangan tidak maksimal sehingga penyelesaian pekerjaan melewati akhir tahun anggaran
  - Adanya efesiensi anggaran akibat review BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat terhadap HPS Pembangunan Gedung Laboratorium BPOM di Mamuju
  - Adanya Efesiensi Anggaran dari sisa hasil lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium BPOM di Mamuju yang tidak memungkinkan dilakukan optimalisasi karena waktu tidak mencukupi.

Agar realisasi anggaran lebih optimal perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut :

- Akan dilakukan perencanaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal lebih cermat.
- Peningkatan kompetensi SDM yang ada diberbagai bidang untuk mempercepat realisasi kegiatan dan anggaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kegiatan dan anggaran dimasing-masing bagian.

### 3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

*Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:*

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

*Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembandingan yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:*

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana Capaian input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

*Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:*

*Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien*

*Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:*

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 19. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN					KATEGORI
		INPUT	OUTPUT	IE	SE	TE	
1	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	100.58	83.68	1.20	1.00	0.20	Efisien
2	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	100.00	71.42	1.40	1.00	0.40	Efisien
3	Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)	100.00	73.68	1.36	1.00	0.36	Efisien
4	Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	225.00	81.07	2.78	1.00	1.78	Efisien
5	Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.69	77.37	1.30	1.00	0.30	Efisien
6	Penyidikan perkara yang diselesaikan hingga tahap II	33.33	47.94	0.70	1.00	-0.30	Tidak Efisien
7	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	100.00	84.18	1.19	1.00	0.19	Efisien

Pada tahun 2018 Balai POM di Mamuju melaksanakan 8 kegiatan utama untuk mendukung 3 Sasaran strategis (OTK Lama) dan 6 Sasaran Strategis (OTK Baru). Dapat dilihat pada table diatas, dari 7 kegiatan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang diperoleh yaitu - 0,30 s/d 1,78, dalam hal ini semakin tinggi nilai TE semakin tinggi tingkat keefesienan. Pengawasan sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju memiliki nilai TE yang tertinggi karena realisasi output paling tinggi yaitu 225 % dengan input hanya sebesar 81.07 % Tingkat Efisiensi pada kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan karena ada beberapa kegiatan yang tidak memerlukan biaya seperti Pembinaan ke sarana PIRT berupa bimbingan teknis, pendampingan dan percepatan sertifikasi produk pangan industry rumah tangga (PIRT) atas permintaan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Barat serta adanya panel kegiatan dengan Gerakan Keamanan Pangan Daerah yang memberdayakan Komunitas IRTP. Kegiatan penyidikan perkara yang diselesaikan hingga tahap II memiliki nilai TE paling rendah karena output yang diperoleh paling rendah yaitu 33.33% dengan input lebih tinggi sebesar 47.94 % tingkat efisiensi pada kegiatan penyidikan perkara hingga tahap II paling rendah karena keterbatasan SDM PPNS yang dimiliki dengan beban kerja yang ada serta adanya perubahan indicator kegiatan OTK baru yaitu penyelesaian perkara sampai tahap II

dimana tahun sebelumnya hanya sampai tahap I ( dari 4 perkara hanya 1 yang sampai pada tahap II)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dengan sumber daya (dana) terbatas Balai POM di Mamuju mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengukuran kegiatan efisiensi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.

Nilai Efisiensi sasaran kegiatan diperoleh dari nilai rata-rata efisiensi kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 20. Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PENGUKURAN					KATEGORI
		INPUT	OUTPUT	IE	SE	TE	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	100.58	83.68	1.20	1.00	0.20	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	71.42	1.40	1.00	0.40	Efisien
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	73.68	1.36	1.00	0.36	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	162.85	79.22	2.78	1.00	1.78	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	33.33	47.94	0.70	1.00	-0.30	Tidak Efisien
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	84.18	1.19	1.00	0.19	Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dapat diketahui bahwa efisiensi paling tinggi terdapat pada Sasaran Startegis ke empat “ Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju “ sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada Sasaran strategis ke Lima yaitu “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju “ meskipun demikian capaian output masih bisa dipertahankan sesuai target.

## IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Balai POM di Mamuju sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Sebagai bentuk perwujudan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Mamuju kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

- Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai target 1 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan kriteria MEMUASKAN yaitu Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Mamuju dalam memberdayakan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat melalui peningkatan pengetahuan terhadap Obat dan makanan aman. Adapun target sasaran lainnya masih dalam kriteria CUKUP dan KURANG, oleh karena itu Balai POM di Mamuju harus lebih berupaya memperbaiki kinerja demi mencapai target yang diberikan.
- Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.830.506.472,- atau 83,41%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 67,10% dengan presentase kenaikan sebesar 16,31%.
- Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dari enam sasaran terdapat lima sasaran yang efisien dan satu yang tidak efisien. Efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran strategis ke tiga yaitu “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”, sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran ke lima yaitu Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Balai POM di Mamuju terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan, dengan peningkatan kinerja dan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

## 4.2 SARAN

Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam lingkup wilayah Balai POM di Mamuju perlu dilakukan beberapa upaya antara lain

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya Balai POM di Mamuju baik dari segi SDM, Penganggaran dan infrastruktur;
2. Meningkatkan cakupan pengawasan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai POM di Mamuju;
3. Meningkatkan pelayanan publik Balai POM di Mamuju dengan melakukan perbaikan sistem pelayanan registrasi untuk efisiensi layanan publik;
4. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan baik untuk *premarket evaluation* maupun *postmarket surveilan* ;
5. Untuk meningkatkan sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang optimal di perlukan dukungan sumber daya dan dana yang cukup, serta sarana dan prasarana yang memadai.

## IV. LAMPIRAN

### 1. Ikhtisar Renstra Balai POM di Mamuju

No.	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Lokasi	Baseline	Target		
					2017	2018	2019
<b>Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju</b>							
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan						
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	90,00	93,00	94,00	
2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	80,00	83,00	85,00	
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	88,00	92,00	95,00	
4	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	78,00	80,00	83,00	
5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sulawesi Barat	-	80,00	83,00	85,00	
2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan						
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sulawesi Barat	-	60,00	65,00	70,00	
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Barat	-	2,00	4,00	6,00	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM						
1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Provinsi Sulawesi Barat	-	A	A	A	
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Di Mamuju</b>							
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia							
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Sulawesi Barat	-	513	513	513	
2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Sulawesi Barat	-	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Barat	-	7,41	7,41	8,33	
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Sulawesi Barat	-	13,77	13,77	15,11	
5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Sulawesi Barat	-	1	1	2	
6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Sulawesi Barat	-	19	19	25	
7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Sulawesi Barat	-	2	4	6	
8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Sulawesi Barat	-	30	35	35	
9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Sulawesi Barat	-	10	9	9	

## 2. Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Mamuju

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513,00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,41
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3,00
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	30,00
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang di laporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9,00
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	19,00
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	4,00
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	30,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	80,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81,00

### 3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513,00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,41
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3,00
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	30,00
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang di laporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9,00
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	19,00
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	4,00
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	30,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	80,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81,00

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Mamuju

Anggaran : Rp.26.172.626.000,00,-

Realisasi : Rp.21.830.506.472,00,-

#### 4. Capaian Kinerja Fisik dan Anggaran Balai Pom Di Mamuju Tahun 2018

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FISIK			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>								
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513,00	499,00	97,27	799.956.000	669.383.427	83,68
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,41	16,67	224,97	108.880.000	88.263.850	81,07
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77	13,86	100,65	518.086.000	400.853.013	77,37
4	Meningkatnya hasil tindakan lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3,00	1,00	33,33	219.790.000	105.363.961	47,94
5	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	30,00	43,19	143,97	22.964.303.000	19.214.542.399	83,67
6	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang di laporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9,00	9,00	100,00	826.395.000	812.462.663	98,31
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	19,00	19,00	100,00	181.623.000	129.720.958	71,42
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	4,00	4,00	100,00	553.593.000	409.916.201	74,05
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	48,80	69,71	108.510.200	93.516.525	86,18
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00	99,10	106,56	119.788.650	103.378.216	86,30
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	80,26	96,70	83.851.900	72.364.751	86,30
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	100,00	120,48	27.950.700	24.121.584	86,30
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	92,00	88,24	95,91	167.704.450	144.729.503	86,30
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	83,00	69,33	83,53	178.684.500	142.558.270	79,78
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	25,76	42,93	90.811.500	64.860.479	71,42
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	63,18	105,30	644.404.500	474.776.680	73,68
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100,00	96,71	96,71	113.465.600	88.714.578	78,19
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	30,00	13,89	46,30	54.440.000	44.131.925	81,07
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	40,00	3,45	8,63	259.043.000	200.426.507	77,37
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	80,00	50,00	62,50	54.440.000	44.131.925	81,07
		Rasio tindakan lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	60,53	121,06	259.043.000	200.426.507	77,37
		Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	25,00	50,00	219.790.000	105.363.961	47,94
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	25,00	50,00	219.790.000	105.363.961	47,94
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81,00	68,80	84,94	23.790.698.000	20.027.005.062	84,18

### 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Mamuju

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	<u>Input :</u> Dana	Rp 799,956,000	Rp 669,383,427	83.68
		<u>Output :</u> Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513 Sampel	516 Sampel	100.58
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	<u>Input :</u> Dana	Rp 90,811,500	Rp 64,860,479	71.42
		<u>Output :</u> Jumlah layanan publik Balai POM di Mamuju	19 Layanan	19 Layanan	100.00
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)	<u>Input :</u> Dana	Rp 644,404,500	Rp 474,776,680	73.68
		<u>Output :</u> Jumlah komunitas yang diberdayakan	4 Desa	4 Desa	100.00
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	<u>Input :</u> Dana	Rp 108,880,000	Rp 88,263,850	81.07
		<u>Output :</u> Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	16 Sarana	36 Sarana	225.00
	Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	<u>Input :</u> Dana	Rp 518,086,000	Rp 400,853,013	77.37
		<u>Output :</u> Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	144 Sarana	145 Sarana	100.69
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Penyidikan perkara yang diselesaikan hingga tahap II	<u>Input :</u> Dana	Rp 219,790,000	Rp 105,363,961	47.94
		<u>Output :</u>			

POM di Mamuju		Perkara Dibidang Penyidikan Obat dan Makanan	3 Perkara	1 Perkara	33.33
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	<u>Input :</u>			
		Dana	Rp 23,790,698,00 0	Rp 20,027,005, 062	84.18
		<u>Output :</u> Jumlah dokumen perencanaan, penganggara n, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Dokumen	9 Dokumen	100.00

## 6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Balai POM di Mamuju

SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	TE	KATEGORI
		INPUT	OUTPUT				
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	83.68	100.58	1.20	1.00	0.20	Efisien
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	71.42	100.00	1.40	1.00	0.40	Efisien
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan mandiri di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)	73.68	100.00	1.36	1.00	0.36	Efisien
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	81.07	100.00	1.23	1.00	0.23	Efisien
	Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	77.37	100.69	1.30	1.00	0.30	Efisien
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Penyidikan perkara yang diselesaikan hingga tahap II	47.94	33.33	0.70	1.00	-0.30	Tidak Efisien
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	84.18	100.00	1.19	1.00	0.19	Efisien